

Hibah Bermasalah, 9 SKPD Diperiksa

Inspektorat-BPK Telusuri Aliran Dana Rp26 Miliar

SUKOHARJO - Penyaluran bantuan dana hibah tahun anggaran 2014 senilai Rp26 miliar bagi lembaga dan perorangan mulai ditelusuri Inspektorat Daerah Sukoharjo.

Berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), bantuan tersebut diduga bermasalah dalam pencairannya.

Tahap awal, Inspektorat memeriksa sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyalurkan dana hibah tersebut. "Ada sembilan SKPD yang menyalurkan dana hibah tahun anggaran 2014. Kami

melakukan pemeriksaan secara maraton untuk meneliti dugaan masalah yang ditemukan BPK," jelas Inspektur Pemkab Sukoharjo Djoko Poernomo kemarin.

Dari sembilan SKPD penyalur dana hibah, lanjut Ipung-sapaan akrab Djoko Poernomo dua diantaranya sudah selesai diperiksa yakni Kantor Kesa-

tuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Bagian Pemerintahan. "Dua SKPD tersebut sudah selesai diperiksa karena jumlah penerima bantuan yang ditangani hanya sedikit. Untuk SKPD yang mengelola penerima dengan jumlah besar belum kami periksa," ujarnya.

Ipung melanjutkan, pemeriksaan tidak hanya berhenti pada penyalur dana saja namun juga penerima bantuan termasuk pemeriksaan fisik terkait realisasi bantuan hibah yang disalurkan. Menurutnya, tahapan pemeriksaan akan dikordinasikan de-

"Ada sembilan SKPD yang menyalurkan dana hibah tahun anggaran 2014."

DJOKO POERNOMO

Inspektur Pemkab Sukoharjo

ngan BPK.

"Kami akan koordinasikan

dengan BPK terkait progress pemeriksaan ini. Apakah semua SKPD atau hanya beberapa untuk mengambil sampel," bebernya.

Sebenarnya pemeriksaan dana hibah tersebut menjadi tugas BPK. Namun, saat melakukan audit pelaksanaan APBD 2014, BPK hanya mengambil sampel beberapa kelompok penerima hibah saja. Hasilnya, BPK menemukan indikasi masalah sehingga memberikan rekomendasi pada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan.

"Kalau jumlah penerima

bantuan mencapai ribuan. Kami selesaikan dulu memeriksa penyalur dana. Baru setelah itu memeriksa penerima dana," tambahnya.

Terkait rekomendasi BPK tersebut, sebelumnya Sekda Sukoharjo Agus Santosa mengaku tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2014 Pemkab Sukoharjo. Menurutnya, dana hibah yang diperiksa tersebut termasuk bantuan sosial dan bantuan keuangan serta dana aspirasi anggota DPRD.

"Intinya, semua dana hibah

akan diperiksa oleh Inspektorat sesuai rekomendasi BPK. Soal teknisnya bagaimana, Inspektorat yang tahu," ujar Agus yang saat ini menjabat Plt Bupati Sukoharjo.

Sekadar diketahui, sesuai data yang ada, jumlah penerima bantuan hibah 2014 mencapai 4.278 proposal. Penerima bantuan merupakan perorangan, kelompok, organisasi masyarakat, dan lainnya. Dana tersebut dikelola oleh sejumlah SKPD dimana penyaluran terbesar ada di Dinas Sosial.

● **sumarno**